

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Memasuki tahun 2025, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan berbagai perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berita di awal tahun mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% cukup menarik perhatian publik, yang kemudian dikonfirmasi bahwa tarif ini hanya berlaku untuk barang mewah (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Selain itu, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025, pemerintah menerapkan efisiensi anggaran nasional dan daerah sebesar 306 triliun rupiah yang juga memengaruhi kualitas pelayanan publik (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025). Di sisi lain, anggaran tersebut dialihkan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang menuai kontroversi dari masyarakat terkait urgensi, kredibilitas pemerintah dalam mengambil keputusan, dan relevansi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada program MBG dan tokoh agama serta presiden terdahulu sebagai badan pengawas Danantara (Setiawan, 2025). Lebih lanjut, program MBG dinilai kontroversial karena adanya lonjakan kasus keracunan massal dengan korban mencapai 5.360 siswa, tetapi mendapatkan respons yang minim dari pemerintah dan program MBG tetap dilanjutkan sampai saat ini (Tempo, 2025). Pada sektor pemerintahan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah melakukan *reshuffle* kabinet sebanyak tiga kali di tahun ini, meliputi menteri di sektor-sektor yang cukup krusial, seperti pendidikan dan keuangan (Tim DetikNews, 2025).

Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia juga harus menghadapi perubahan kebijakan dalam sektor ekonomi. Peraturan baru mengenai pembelian *liquefied petroleum gas* (LPG) 3 kg bersubsidi yang hanya tersedia di pangkalan resmi Pertamina per 1 Februari 2025 lalu membuat masyarakat kesulitan, baik dari segi aksesibilitas maupun keberlanjutan usaha yang bergantung pada gas LPG tersebut (Muhid, 2025). Per 1 Juli 2025 lalu, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mengalami kenaikan sebesar

Rp400–Rp580 per liter di berbagai wilayah (Yulianti, 2025). Beberapa bahan pokok juga mengalami kenaikan harga, seperti ayam, cabai, dan telur dengan kenaikan harga mencapai Rp2.000–Rp40.000 per kilogram, baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa. Naiknya harga pokok ini menyebabkan daya beli konsumen melemah dan omzet pedagang turun hingga lima puluh persen (Laili, 2025). Tantangan ekonomi ini turut dialami pula oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan PT Yamaha Music Indonesia, sehingga berujung pada penghentian operasi dan penutupan pabrik (CNN Indonesia, 2025).

Kondisi ekonomi yang melemah turut berdampak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan merilis data statistik terkait tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam rentang Januari–Agustus 2025 sejumlah 44.333 orang. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia merupakan angka tertinggi di ASEAN sebesar 4,76% atau 7,28 juta orang. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa kelompok usia di bawah 24 tahun menyumbang angka pengangguran tertinggi, yaitu sebesar 16,16% jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Kemudian, data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2025) per Februari 2025 menyajikan bahwa jumlah pekerja informal di Indonesia menyentuh angka 59,40% atau 86,58 juta orang. Angka ini memiliki selisih yang cukup jauh dengan jumlah pekerja formal, yaitu sebesar 40,60% atau 59,19 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan lapangan kerja di Indonesia masih terbatas dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Berbagai perubahan kebijakan serta ketidakstabilan ekonomi yang terjadi juga turut berdampak pada kelompok usia dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan salah satu tahap perkembangan yang dimulai dari akhir usia remaja hingga akhir usia tiga puluh tahun atau usia 18–40 tahun (Santrock, 2022; Hurlock, 2001). Rentang usia ini juga termasuk ke dalam usia produktif, yaitu 15–64 tahun (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022). Seperti tahap perkembangan lainnya, masa dewasa awal juga memiliki tugas perkembangannya sendiri. Hurlock (2001) merangkum tugas perkembangan dewasa awal yang dicetuskan oleh Havighurst, yaitu memulai pekerjaan, memilih pasangan, memulai kehidupan

baru dengan pasangan setelah menikah, membangun sebuah keluarga, membesarakan anak, bertanggung jawab sebagai warga negara, dan menemukan kelompok sosial yang sesuai dengan individu. Pada tahap ini, individu mulai dihadapkan dengan tantangan sosial dan ekonomi yang harus diselesaikan secara mandiri.

Masa dewasa awal merupakan periode yang cukup krusial dalam pembentukan identitas politik individu. Pada tahap ini, eksplorasi identitas serta motivasi politik yang bersifat otonom berperan dalam meningkatnya aktivitas pencarian informasi mengenai isu politik, membentuk sikap politik yang lebih kuat, serta menentukan orientasi ideologi politik individu (Walker & Iverson, 2016). Identitas politik individu umumnya terbentuk dari sikap-sikap terhadap isu yang telah dimiliki sebelumnya (Rekker dkk., 2017). Dalam hal ini, sikap terhadap budaya yang berkembang sejak dulu turut memengaruhi pembentukan identitas politik di kemudian hari, yang selanjutnya membimbing pandangan ekonomi pada masa dewasa awal (Rekker dkk., 2015; Hooghe & Wilkenfeld, 2008).

Sebagai kelompok usia yang termasuk ke dalam angkatan kerja serta memiliki tugas perkembangan yang cukup krusial, dewasa awal menjadi kelompok usia yang paling vokal dalam menyuarakan keresahan terhadap isu-isu politik, baik melalui aksi demo atau media sosial. Hal ini ditunjukkan melalui aksi Indonesia Gelap pada 17–21 Februari 2025 lalu, di mana aksi tersebut dipelopori generasi muda, yaitu mahasiswa dan beberapa masyarakat sipil lainnya (Azura dkk., 2025). Selain itu, di media sosial, banyak generasi muda memanfaatkan platform tersebut untuk menyuarakan pandangannya, berdiskusi, dan berbagi informasi terhadap isu terkini, salah satunya isu politik (Nugraha dkk., 2025).

Studi pendahuluan terhadap 24 responden dilakukan oleh peneliti untuk menelusuri lebih lanjut terkait apa yang dirasakan dewasa awal terkait perubahan situasi politik yang terjadi belakangan ini. Sebagian besar responden mengaku merasa muak, marah, kecewa, resah, pesimis, dan cemas terhadap masa depannya dan negara karena situasi politik yang terjadi. Meskipun demikian, beberapa responden tetap bersikap kritis dan berharap arah kebijakan dan politik akan semakin transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat ke depannya.

Kemudian, terkait dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan mereka saat ini atau di masa depan, sebagian besar responden menilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak yang sangat besar, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di masa depan nanti. Mereka mengaku merasa resah karena meningkatnya harga kebutuhan pokok, pajak naik, akses pendidikan melemah, dan kesempatan kerja semakin sulit, sehingga masa depan generasi muda akan semakin tidak pasti. Meskipun sebagian responden mengaku belum terlalu merasakan dampaknya secara signifikan karena masih bergantung pada orang tua, mereka tetap meyakini bahwa keputusan politik saat ini sangat menentukan kesejahteraan mereka di masa mendatang.

Selanjutnya, hampir seluruh responden merasa cemas dan khawatir akan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan hidup di masa depan karena kondisi ekonomi dan politik saat ini. Ketidakstabilan kebijakan pemerintah, harga kebutuhan pokok yang terus naik, serta kesempatan kerja yang semakin sempit membuat masa depan mereka terasa semakin tidak pasti. Minimnya lapangan pekerjaan dan semakin tingginya persyaratan kerja tetapi tidak digaji dengan layak menimbulkan rasa cemas mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan lanjut, tempat tinggal, pernikahan, dan keluarga. Mereka memandang bahwa sekeras apapun mereka bekerja, semuanya akan tetap terhambat jika kondisi ekonomi dan politik negara memburuk. Meskipun ada sebagian kecil responden yang tetap berusaha untuk optimis, sebagian besar responden merasa terancam terhadap situasi ekonomi dan politik saat ini, sehingga mereka cemas akan keberhasilan dalam mencapai tujuan hidup di masa depan.

Dalam hal yang paling membuat mereka cemas akan masa depan, sebagian besar responden menyatakan bahwa masa depan dalam hal karier dan ekonomi merupakan kecemasan terbesar mereka di tengah ketidakpastian situasi ekonomi dan politik saat ini. Mereka khawatir akan sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, ketatnya persaingan kerja, dan ketidaksesuaian antara upah dan biaya hidup yang terus meningkat. Kekhawatiran tersebut juga berkaitan dengan akses pendidikan yang dianggap semakin sulit dan mahal, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan karier dan peningkatan kualitas hidup mereka di masa depan. Selain aspek ekonomi, responden juga membahas terkait

ketidakpastian dalam membangun keluarga, seperti kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan membesarkan anak dalam kondisi negara yang tidak stabil. Responden lain membahas terkait kekhawatiran akan kebebasan berpendapat, kualitas penegakan hukum, serta arah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, antikritik, dan menurunkan rasa aman warga negara.

Terakhir, hampir seluruh responden mengungkapkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk opini mereka terkait isu politik. Media sosial dianggap sebagai sumber informasi yang mudah diakses dan menyajikan berbagai macam perspektif yang sebelumnya tidak mereka pikirkan. Berbagai sudut pandang dari netizen dan *influencer* membuat mereka lebih terbuka dalam memahami fenomena politik, bahkan terkadang memunculkan opini baru setelah membaca tanggapan orang lain. Namun, paparan informasi yang cukup masif dan terkadang provokatif, bias, atau bahkan hoaks, membuat mereka harus lebih teliti dalam menyaring informasi. Meskipun sebagian kecil responden mengaku bersikap pasif, mayoritas responden menilai media sosial menjadi faktor yang memengaruhi pembentukan opini dan kesadaran mereka terhadap isu atau fenomena saat ini.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan kepada dewasa awal tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki kesadaran akan kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Namun, kesadaran tersebut membuat mereka juga merasa cemas akan masa depan, terutama terkait pendidikan, karier, keluarga, dan kondisi ekonomi yang akan mereka hadapi. Gambaran ini menunjukkan adanya kecemasan akan masa depan yang dialami oleh dewasa awal. Menurut Zaleski (1996), kecemasan akan masa depan adalah kondisi emosional ketika individu merasa takut, khawatir, prihatin, dan tidak pasti terkait perubahan yang tidak menyenangkan di masa depan. Dalam konsep ini, ketakutan yang dialami individu mengacu pada kesia-siaan upaya dalam mencapai tujuan yang diinginkan, terutama ketika masa depan mereka terasa dipertaruhkan. Kecemasan akan masa depan ini berbeda dengan kecemasan secara umum dan lebih menitikberatkan pada rendahnya kualitas hidup yang akan dihadapi, kesepian, serta pesimisme.

Kecemasan akan masa depan dapat menyebabkan berbagai dampak psikologis bagi individu. Zaleski dkk. (2017) menyatakan individu dengan kecemasan akan masa depan yang tinggi cenderung lebih pesimis dalam menyelesaikan masalah di masa depan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian oleh Syuhadak dkk. (2022), yaitu individu dengan kecemasan akan masa depan yang tinggi cenderung memiliki harapan yang rendah. Selain itu, penelitian oleh Qolbi dkk. (2020) menunjukkan bahwa kecemasan akan masa depan memiliki hubungan negatif terhadap *subjective well-being*. Artinya, semakin tinggi kecemasan akan masa depan individu, maka semakin rendah *subjective well-being* yang dialaminya. Pada dewasa awal, dampak psikologis ini dapat memengaruhi kesiapan mereka dalam memenuhi tanggung jawab perkembangan, terutama di masa yang akan datang.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kecemasan akan masa depan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian oleh Hutapea dan Budiarto (2024) terhadap mahasiswa akhir menyatakan bahwa kecemasan akan masa depan disebabkan oleh kekhawatiran dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai minat, kecocokan individu di lingkungan kerja, serta kesempatan berkembang di tempat kerja. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor lain yang memengaruhi kecemasan akan masa depan, yaitu kondisi finansial, kesejahteraan personal, relasi sosial, tantangan dalam melanjutkan studi, peralihan menuju kehidupan dewasa, serta peran individu dalam keluarga. Penelitian yang cukup serupa oleh Jung dkk. (2025) mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab kecemasan akan masa depan mencakup jenis kelamin, usia, status pernikahan, pengalaman depresi serta stres, dan kondisi kesehatan. Lebih lanjut, tingkat pendapatan dan struktur dalam rumah tangga turut memengaruhi kecemasan akan masa depan. Sedangkan, penelitian oleh Szota dkk. (2024) lebih menekankan faktor psikologis yang menyebabkan kecemasan akan masa depan, yaitu *self-efficacy* atau keyakinan diri. Semakin rendah keyakinan diri individu, maka semakin tinggi kecemasan akan masa depan yang dialaminya. Tingginya kecemasan akan masa depan ini dapat meningkatkan gejala depresi pada individu dewasa.

Hasil dari studi pendahuluan tidak hanya menggambarkan kecemasan akan masa depan yang dirasakan dewasa awal, tetapi juga menunjukkan bagaimana pandangan mereka terhadap situasi politik yang terjadi saat ini. Mereka memandang pemerintah semakin tidak transparan, tidak rasional, tidak berpihak kepada rakyat, dan hanya mengutamakan kepentingan kelompok yang berkuasa. Kebijakan yang dibuat pemerintah dianggap asal-asalan, minim riset dan evaluasi, tidak sesuai kebutuhan masyarakat, dan bahkan memperburuk kesejahteraan rakyat kecil. Kekecewaan ini juga dipicu oleh sikap pejabat publik yang dinilai gegabah, abai, dan tidak kompeten, ditambah praktik politik yang dipandang penuh korupsi, kolusi, nepotisme, serta pembungkaman suara dan aspirasi rakyat. Mereka juga menilai bahwa kinerja dan kebijakan pemerintah tersebut memiliki dampak yang besar dalam kehidupan mereka, tetapi kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran justru berdampak pada sektor-sektor yang krusial, seperti pendidikan, ekonomi, dan lapangan pekerjaan.

Temuan dari studi pendahuluan tersebut mengindikasikan bahwa kecemasan akan masa depan yang dialami dewasa awal tidak dapat dilepaskan dari bagaimana persepsi mereka terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, salah satu faktor psikologis yang diprediksi berperan dalam memengaruhi kecemasan akan masa depan dalam penelitian ini adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Grimmelikhuijsen dan Knies (2015) mendefinisikan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai kesediaan warga negara untuk menjadi rentan terhadap tindakan pemerintah berdasarkan harapan bahwa pemerintah akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi warga negara, terlepas dari kemampuan memonitor atau mengendalikan pemerintah. Kepercayaan ini muncul dari persepsi warga negara terhadap kompetensi, integritas, dan niat baik pemerintah. Dalam penelitian terdahulu, kepercayaan terhadap pemerintah kerap diteliti dalam situasi yang cukup genting secara global, seperti pandemi Covid-19 (Adinugroho & Simanjuntak, 2021; Reid dkk., 2024; Scandurra dkk., 2023).

Melihat perubahan situasi politik di Indonesia saat ini, kepercayaan terhadap pemerintah memainkan peran yang cukup penting dalam terjadinya beberapa aksi demo dan gerakan massa beberapa saat terakhir. Fenomena

#ResetIndonesia, misalnya, didorong oleh gerakan-gerakan demonstrasi yang dimulai di Jakarta pada 25–31 Agustus 2025. Massa gerakan tersebut terdiri dari buruh, mahasiswa, pengemudi ojek *online*, dan masyarakat sipil yang turun ke jalan dan dengan cepat menyebar ke berbagai daerah. Aksi ini bukan aksi demonstrasi pertama yang terjadi pada tahun 2025. Terdapat beberapa aksi demonstrasi yang telah terjadi sebelumnya, salah satunya adalah demo #IndonesiaGelap yang terjadi pada 17–20 Februari 2025. Dilansir dari konferensi pers Bareng Warga (@barengwarga) di X, faktor utama dari munculnya aksi demonstrasi #IndonesiaGelap ini adalah kebijakan-kebijakan dari presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto, yang dinilai merugikan rakyat dengan beberapa kebijakan kontroversial yang telah dijabarkan sebelumnya.

Namun, dari aksi demonstrasi tersebut, tidak banyak evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi kebijakan yang ada. Dilansir dari artikel berita pada Detik Jabar oleh Maulana (2025), pada Sidang Tahunan MPR yang diselenggarakan 15 Agustus 2025, tersiar sebuah video di mana para pemangku kebijakan legislatif tengah berjoget seolah tidak memiliki rasa simpati kepada rakyat yang sedang mengalami kondisi sulit. Hal ini semakin diperburuk oleh beredarnya pendapatan anggota DPR yang berjumlah 27 kali lipat dari rata-rata pendapatan rakyat Indonesia setiap bulannya. Beberapa anggota dewan, seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, menanggapi protes rakyat mengenai pendapatan tersebut dengan pernyataan yang kontroversial dan semakin memicu amarah rakyat. Persoalan-persoalan inilah yang menggerakkan rakyat untuk turun ke jalan dan menyuarakan tuntutannya di depan gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025. Salah satu tuntutan yang diajukan melalui siaran pers Aliansi Rakyat Merdeka adalah pembatalan tunjangan rumah untuk anggota DPR yang saat itu mencapai angka 50 juta rupiah per bulan. Aksi demonstrasi kembali berlanjut pada 28 Agustus 2025 yang didominasi oleh pengemudi ojek *online* dengan tuntutan yang sama karena belum ada tanggapan dari anggota dewan. Meskipun demikian, terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh lemparan batu dan molotov di sekitar titik demonstrasi yang dibalas dengan gas air mata oleh aparat kepolisian. Rakyat yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya pun berlarian menjauh untuk menyelamatkan diri. Di tengah kerusuhan tersebut, sebuah kendaraan taktis

Brimob turut dikerahkan untuk menerobos kerumunan dan dikemudikan dengan sembrono sampai melindas seorang pengemudi ojek *online* bernama Affan Kurniawan. Kabar wafatnya Affan pun memicu amarah rakyat. Pada 29–30 Agustus 2025, aksi demonstrasi menyebar dengan cepat ke berbagai daerah, meliputi Bandung, Solo, Makassar, dan Surabaya.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menurun karena adanya kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas, layanan birokrasi yang buruk, dan kurangnya prinsip keadilan dalam penegakan hukum (Andhika, 2018). Fenomena ini memungkinkan munculnya krisis kepercayaan tersebut. Melalui media sosial, keresahan yang banyak dirasakan oleh masyarakat ini dengan cepat tersebar melalui tagar #ResetIndonesia. Tagar tersebut menjadi sarana digital dalam menyalurkan kritik dan opini publik, menyebarluaskan kesadaran akan pentingnya situasi politik nasional, dan menghimpun massa untuk turut menyuarakan secara langsung. Terjadinya fenomena ini menggambarkan adanya kekhawatiran dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dialami oleh masyarakat, terutama pada dewasa awal sebagai generasi muda yang turut menyuarakan aspirasinya di media sosial.

Kepercayaan terhadap pemerintah diprediksi dapat memengaruhi kecemasan akan masa depan berdasarkan hasil dari studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian terdahulu oleh Scandurra dkk. (2023). Penelitian oleh Scandurra dkk. (2023) mengungkapkan bahwa semakin rendah kepercayaan terhadap pemerintah, maka semakin tinggi kecemasan akan masa depan yang dialami individu. Di samping itu, dari studi pendahuluan mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan mereka, sebagian besar responden merasa rasa aman menurun, semakin tidak percaya terhadap pemerintah dan aparat, serta cemas akan masa depan. Respons yang serupa juga diberikan oleh beberapa responden terkait apa yang mereka rasakan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan politik, yaitu mereka merasa putus asa, tidak percaya kepada pemerintah, dan khawatir untuk tetap tinggal dan membangun masa depan di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berkaitan erat dengan kecemasan akan masa depan, khususnya dalam situasi politik yang sarat ketidakpastian.

Meskipun sebagian besar responden dalam studi pendahuluan menunjukkan kecemasan akan masa depan sebagai respons terhadap perubahan situasi politik yang terjadi, temuan ini juga menunjukkan adanya perbedaan respons di antara individu. Sebanyak 8,3% responden menunjukkan sikap yang optimis dalam memandang masa depan mereka, meskipun berada dalam situasi politik yang sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa situasi politik yang sarat ketidakpastian tidak secara otomatis menimbulkan kecemasan pada seluruh individu. Dengan kata lain, terdapat individu yang tetap mampu mempertahankan pandangan positif terhadap masa depan, sementara individu lain merasa cemas akan masa depannya. Perbedaan respons ini mengindikasikan adanya faktor psikologis tertentu yang berpotensi berperan dalam membedakan individu yang mengalami kecemasan akan masa depan dengan individu yang tidak, meskipun menghadapi situasi yang sama.

Salah satu faktor yang diperkirakan dapat berperan sebagai pelindung (*protective factor*) dalam menghadapi perubahan kondisi politik ini adalah resiliensi. Menurut Connor dan Davidson (2003), resiliensi adalah kualitas pribadi yang memungkinkan individu bangkit kembali dan berkembang dalam menghadapi kesulitan. Dalam penelitian ini, resiliensi diprediksi dapat menjadi variabel yang relevan dalam menjadi faktor protektif bagi individu karena mendorong individu untuk beradaptasi dan mengembangkan diri dalam situasi politik yang tidak pasti seperti saat ini. Penelitian oleh Mutia dan Hargiana (2021) menunjukkan bahwa resiliensi memiliki hubungan yang negatif dengan kecemasan akan masa depan. Artinya, semakin tinggi resiliensi yang dimiliki, maka kecemasan akan masa depan yang dirasakan individu semakin rendah. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa resiliensi dapat menjadi faktor protektif bagi individu agar terhindar dari kecemasan akan masa depan. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Hu dkk. (2023) mengungkapkan bahwa resiliensi dapat menguatkan pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah dalam menurunkan kecemasan individu. Dengan demikian, berdasarkan penelitian tersebut, resiliensi terbukti dapat menjadi faktor pelindung bagi individu dalam menurunkan kecemasan yang dialami ketika menghadapi situasi krisis, termasuk ketidakpastian situasi politik saat ini.

Sementara itu, penelitian oleh Scharte (2023) mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peran resiliensi dan kepercayaan dalam menghadapi situasi atau krisis yang sulit. Menurutnya, resiliensi dan kepercayaan dapat menjadi mekanisme yang saling melengkapi untuk mengelola situasi sulit yang dihadapi individu. Lebih lanjut, temuan tersebut menekankan pentingnya peran komunikasi yang transparan dan ketidakpercayaan atau skeptisme yang sehat agar mendorong respons proaktif individu terhadap krisis yang dihadapi. Dengan demikian, dalam penelitian ini, resiliensi menjadi variabel yang relevan dengan kepercayaan terhadap pemerintah dan kecemasan akan masa depan dalam menghadapi ketidakpastian situasi politik di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan terhadap pemerintah memengaruhi kecemasan akan masa depan yang kemudian dimoderatori oleh resiliensi dalam fenomena perubahan politik saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kecemasan akan masa depan dengan peran resiliensi sebagai moderator dalam perubahan situasi politik di Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan kondisi politik di Indonesia, terutama pada sektor-sektor krusial, yang kemudian berujung pada terjadinya beberapa aksi demonstrasi mencerminkan adanya kerohanian dan potensi krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
- 2) Aksi demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas yang menentang perubahan kebijakan politik merupakan individu dalam usia dewasa awal, seperti mahasiswa dan pekerja, karena memiliki tugas perkembangan krusial yang turut terdampak dari kebijakan tersebut.
- 3) Temuan dari studi pendahuluan menunjukkan bahwa sebagian besar dewasa awal merasakan kecemasan akan masa depan sebagai respons terhadap ketidakpastian situasi politik saat ini yang berdampak di kehidupan mereka.

- 4) Kecemasan akan masa depan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan politik, tetapi juga oleh faktor psikologis individu, salah satunya adalah kepercayaan terhadap pemerintah.
- 5) Individu dengan kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi cenderung memiliki kecemasan akan masa depan yang rendah dibandingkan individu dengan kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah.
- 6) Resiliensi dapat menjadi faktor psikologis yang melindungi individu dari kecemasan akan masa depan yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam situasi politik di Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kecemasan akan masa depan dengan peran resiliensi sebagai moderator dalam perubahan situasi politik di Indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah resiliensi dapat memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kecemasan akan masa depan dalam perubahan situasi politik di Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kecemasan akan masa depan dengan peran resiliensi sebagai moderator dalam perubahan situasi politik di Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian literatur dalam bidang psikologi sosial dan politik mengenai pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kecemasan akan masa depan dengan peran resiliensi sebagai moderator dalam fenomena politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoretis bagi peneliti selanjutnya yang mendalami pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kecemasan akan masa depan dengan peran resiliensi sebagai moderator.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah dan Perumus Kebijakan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merancang kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan menyusun strategi komunikasi publik yang baik dan responsif atas kerohanian yang disampaikan. Dengan memahami dampak yang disebabkan oleh kepercayaan publik, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pendekatan yang terbuka dan melibatkan peran masyarakat di dalamnya.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat dalam memahami faktor psikologis yang memengaruhi kecemasan akan masa depan mereka dalam ketidakpastian situasi politik di Indonesia. Dengan memahami faktor psikologis tersebut, masyarakat dapat menjaga dan menguatkan kesehatan mental di tengah perubahan situasi politik, salah satunya dengan menguatkan resiliensi.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengeksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor psikologis yang saling berhubungan dalam menghadapi fenomena politik.